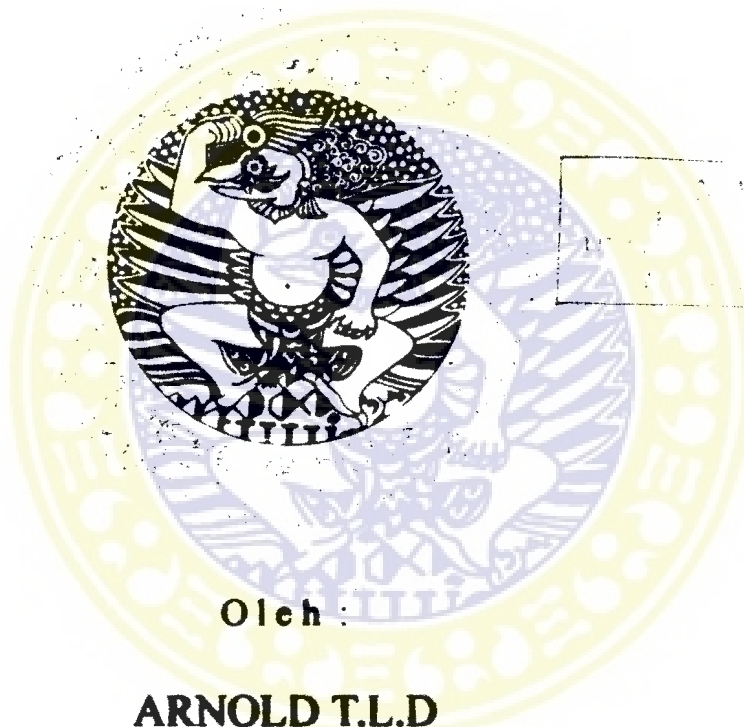


**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KEINGINAN  
JEPANG MENJADI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN  
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

**SKRIPSI**

KIC  
Fas H104/00  
Arn  
f



Oleh :

**ARNOLD T.L.D**

**NPM : 079414270**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GANJIL TAHUN 1999 / 2000**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui untuk diujikan

Surabaya, tanggal 5 Januari 2000



Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lili Salamah', written over a horizontal line.

Dra. Lili Salamah, Msi

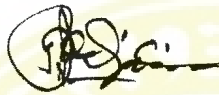
N.I.P. 131 389 360

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan penguji pada tanggal 5 Januari 2000.

Panitia penguji terdiri dari :

Ketua



( Drs. T. Soedjadino, M.A )

N.I.P. 130 368 697

Anggota :



( Dra. Lilik Salamah, Msi )

N.I.P. 131 389 360



( Dra. B.L.S. Wahyu Wardhani )

N.I.P. 131 801 409

## ABSTRAK

Dipandang dari sudut manapun, Jepang termasuk negara yang memiliki banyak keunikan. Sebagai negara yang pernah merasakan 'hadiah' bom atom yang diberikan oleh Pasukan Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, dalam hanya beberapa dekade (lebih kurang tiga dekade), Jepang telah mampu bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia dan satu-satunya negara Asia yang dapat menyaingi negara-negara industri maju Barat dalam hal industrialisasi dan teknologi. Keunikan kedua, dengan adanya budaya dan teknologi Barat yang gencar 'menyerbu' Jepang sebagai akibat dari industrialisasi, liberalisasi dan perkembangan teknologi, Jepang tidak kehilangan jati diri budaya-nya yang merupakan bagian dari Asia; dan bahkan Jepang mampu memperluas dan memperkenalkan kebudayaannya kepada negara-negara lain. Keunikan ketiga, dengan kapabilitas ekonomi yang dimilikinya, Jepang malah tidak menjelma menjadi negara yang kuat secara militer. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol sipil yang kuat dan konstitusi yang melarang penguatan dan penggunaan kekuatan militer. Sebagai gantinya, untuk masalah pertahanan-keamanan, Jepang menggantungkan diri pada perlindungan keamanan dan nuklir dari Amerika Serikat sebagai negara sekutunya.

Berakhirnya Perang Dingin merubah situasi internasional dan membawa perubahan penting pada kebijakan politik dan pertahanan-keamanan Jepang. Jepang tidak lagi dapat menggantungkan keamanannya pada Amerika Serikat, karena Amerika Serikat sendiri sedang menghadapi berbagai permasalahan di dalam negeri dan ekonominya mengalami kemunduran relatif. Perang Teluk makin mendorong keinginan Jepang untuk lebih aktif dalam isu-isu internasional dan mendukung terlaksana dan terpeliharanya liberalisasi ekonomi dan politik yang penting bagi kepentingan nasionalnya sendiri.

Untuk itu, Jepang kemudian merumuskan berbagai alternatif kebijakan politik luar negeri yang fleksibel, yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi kepentingan nasionalnya dengan tidak mengorbankan filsafat pacifisme dan anti-militerisme, yang selama beberapa dekade dianut dan yang telah memberikan keuntungan berupa kemajuan ekonomi.

Salah satu alternatif, yang tampaknya sangat sesuai dan cenderung digunakan sebagai kebijakan politik luar negeri Jepang pasca-Perang Dingin adalah diplomasi di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Langkah yang diambil dalam diplomasi ini adalah keinginan Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan keanggotaan tetap di dalam Dewan Keamanan, diharapkan Jepang dapat memperluas peran aktif dalam menangani isu-isu internasional, mendorong pencapaian kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan dasar-dasar konstitusionalnya, dan sekaligus melaksanakan reformasi, restrukturisasi, dan demokratisasi di tubuh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan tuntutan banyak negara anggota PBB, khususnya negara-negara berkembang.